PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Penyelenggargaan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, akuntabilitas serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan terhadap pengusaha/perusahaan dan perorangan dalam pemanfaaat kayu dan non kayu dari hutan atau tanah milik, eksploitasi, industri dan bahan bangunan serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya perlu disesuaikan dengan perkembangan Daerah;
 - d. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pem-bentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
- 6. Surat Menteri Kehutanan Nomor 378/Menhut-II/1994 tanggal 28 Maret 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU DARI TANAH

MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu Dari Tanah Milik dan Atau Hutan Lainnya, diubah sebagai berikut :

1. BAB II, Perizinan Ketentuan pasal 2 ayat (2) di ubah menjadi 2 sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha/perorangan yang memanfaatkan kayu dan bukan kayu dari tanah milik dan atau hutan lainya harus memilki izin.
- (2) Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu s/d 100 M3 dan Bukan Kayu diatas s/d 100 Ton dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat.
- (3) Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu 100 s/d 490 M3 dan Bukan Kayu diatas 100 s/d 490 Ton dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat.
- (4) Sedang izin dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Lampung Barat untuk Volume Kurang dari atau sama dengan 5 M3 kayu dan 5 Ton bukan kayu.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa

Pada tanggal : 30 Juni 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 NOMOR 18